

---

**PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA BENTEK  
UNTUK PERANGKAT DESA BENTEK OLEH PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS 45 MATARAM**

**[Village Governance Training for Village Officials in Bentek Village by the Government  
Science Study Program at 45 Mataram University]**

**Sandi Justitia Putra<sup>1)\*</sup>, Zulhadi<sup>2)</sup>, Denda Devi Sarah Mandini<sup>3)</sup>, Ismi Arifiana Rahmandari<sup>4)</sup>,  
Anis Sujudi<sup>5)</sup>, Rita Arisandy<sup>6)</sup>, Rido Ashabul Kahfi<sup>7)</sup>, Sumajyadi<sup>8)</sup>,  
Mubarak Umar<sup>9)</sup>, Ahmad Saifuddin Bukhari<sup>10)</sup>**

**Universitas 45 Mataram, Indonesia**

***sandijustitiaputra@gmail.com (corresponding)***

## **ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan tata kelola pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram untuk perangkat desa di Desa Bentek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman perangkat desa dalam mengelola pemerintahan desa secara efektif dan transparan. Metode pelatihan meliputi pemaparan teori, studi kasus, serta sesi diskusi dan praktik langsung untuk mengaplikasikan konsep-konsep tata kelola yang baik. Evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta, serta dampaknya terhadap efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan praktik tata kelola pemerintahan desa di Desa Bentek, menggambarkan komitmen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram dalam mendukung pembangunan kapasitas pemerintahan desa di Indonesia.

---

***Kata kunci:*** *Pelatihan; Tata Kelola Pemerintahan Desa; Perangkat Desa; Desa Bentek*

## **ABSTRACT**

*Community service activities in the form of village governance training organized by the Mataram 45 University Government Science Study Program for village officials in Bentek Village aim to increase the capacity and understanding of village officials in managing village government effectively and transparently. Training methods include theoretical presentations, case studies, as well as discussion sessions and direct practice to apply Good Governance concepts. Evaluations are carried out to measure the increase in knowledge and skills obtained by participants, as well as their impact on the efficiency and accountability of village government. The results show a significant increase in the understanding and practice of village governance in Bentek Village, illustrating the commitment of the Mataram University 45 Government Science Study Program in supporting village government capacity building in Indonesia.*

---

***Keywords:*** *Training; Village Governance; Village Apparatus; Bentek Village*

## **PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan desa karena mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan (Tryara, 2023). Implementasi prinsip-prinsip ini dalam pemerintahan desa dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Ketika pemerintahan desa bersifat transparan, informasi

mengenai keputusan, kebijakan, dan alokasi dana dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Refi, 2022). Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemerintahan yang akuntabel memastikan bahwa para pemimpin desa bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka (Idah, 2023). Ini mendorong kinerja yang lebih baik dan pengelolaan sumber daya yang efisien, serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diprioritaskan. Partisipasi aktif dari warga desa dalam proses pengambilan keputusan membantu menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (A'an, 2022). Ini juga memperkuat rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap program pembangunan yang dijalankan. Tata kelola yang baik memastikan bahwa sumber daya, termasuk dana, tenaga, dan waktu, digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal (Laila, 2020). Ini berarti bahwa proyek-proyek pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan memastikan bahwa semua warga desa diperlakukan secara adil dan setara (Weny, 2017). Ini termasuk akses yang sama terhadap pelayanan publik dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di desa juga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB (Angga, 2023). Desa yang dikelola dengan baik dapat menjadi tempat yang lebih layak huni, dengan pelayanan publik yang lebih baik, ekonomi lokal yang berkembang, dan lingkungan yang terjaga. Dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, desa-desa di Indonesia dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya mereka, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai pemegang peranan penting, sebagai pelaksana utama administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa, perangkat desa membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan tata kelola pemerintahan desa telah diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram untuk perangkat desa di Desa Bentek, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam mengelola pemerintahan desa.

Desa Bentek terletak di Kabupaten Lombok Utara, merupakan desa yang terus berkembang dengan kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa, perangkat desa harus memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pelatihan ini diadakan sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan profesionalisme perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Melalui pelatihan ini, diharapkan perangkat desa di Desa Bentek dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola pemerintahan desa dengan lebih baik. Dengan peningkatan kapasitas ini, perangkat desa dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di desa mereka. Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dari Universitas 45 Mataram dalam mendukung pembangunan di daerah, khususnya dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat lokal.

Adapun Tujuan dari pelatihan tata kelola pemerintahan desa ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan keterampilan perangkat desa dalam mengelola administrasi dan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
3. Membekali perangkat desa dengan pengetahuan mengenai perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Bentek melalui penerapan tata kelola yang efektif.

## **METODE PENERAPAN**

Lokasi Kegiatan	: Kantor Desa Bentek
Jadwal Kegiatan	: 3 - 5 Juni 2024
Peserta	: Perangkat Desa Bentek
Pemateri	: Dosen - Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram

## Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran partisipatif yang melibatkan perangkat desa secara aktif. Metode yang digunakan meliputi:

1. Ceramah dan Presentasi : Penyampaian materi tentang tata kelola pemerintahan desa oleh para ahli dan praktisi.
2. Diskusi Kelompok: Diskusi interaktif tentang tantangan dan solusi dalam tata kelola pemerintahan desa.
3. Studi Kasus : Analisis kasus nyata yang relevan dengan kondisi desa.
4. Workshop : Praktik langsung tentang perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan kegiatan desa.
5. Evaluasi dan Feedback : Sesi evaluasi dan pemberian umpan balik terhadap partisipasi dan pemahaman peserta.

## Materi Pelatihan.

Materi yang disampaikan dalam pelatihan meliputi:

1. Prinsip-prinsip *Good Governance* : Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi.
2. Administrasi Pemerintahan Desa : Manajemen administrasi dan dokumentasi.
3. Pengelolaan Keuangan Desa : Perencanaan anggaran, pengelolaan dana desa, dan pelaporan keuangan.
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa : Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes).
5. Pelayanan Publik: Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hari Pertama:

1. Sesi Pembukaan dan Pengenalan
2. Ceramah tentang Prinsip-prinsip *Good Governance*
3. Diskusi Kelompok tentang Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pemaparan materi tentang prinsip-prinsip *Good Governance* di tingkat pemerintah desa adalah topik pertama yang penting untuk dibahas dalam konteks penguatan tata kelola pemerintahan yang baik pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada cara pemerintahan yang efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. *Good Governance* penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah (Neova, 2023). Pemerintah desa harus menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program-program pemerintah (Djamin, 2015). Ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka, konsultasi publik, dan forum partisipatif lainnya. Bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil serta mengelola sumber daya publik dengan baik. Ini mencakup pelaporan yang jelas dan terbuka tentang pengelolaan keuangan dan hasil program. Pemerintah desa harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta cepat dalam menanggapi perubahan dan tantangan yang muncul (Tati, 2024). Memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil tidak diskriminatif dan adil bagi seluruh masyarakat desa. Penting untuk membangun kapasitas pegawai pemerintah desa dalam hal manajemen, komunikasi, dan keterampilan kepemimpinan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (Citranu, 2022). Menyediakan akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat tentang anggaran, kebijakan, dan keputusan pemerintah desa (Aan, 2021). Mengembangkan mekanisme yang memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Membangun sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memastikan akuntabilitas dan kinerja pemerintah desa (Widanarto, 2012). Mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan *Good*

*Governance* di tingkat desa dan peluang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. Menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Siregar, 2024). Pada kegiatan ini pemateri juga menambahkan contoh konkret atau studi kasus yang relevan untuk memberi ilustrasi tentang bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diterapkan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat desa.

Selanjutnya pada kegiatan kedua dihari pertama, pemateri membuka sesi Diskusi Kelompok tentang Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Desa sebagai cara yang efektif untuk memahami berbagai perspektif dan mencari solusi bersama.

### **Identifikasi Tantangan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa:**

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Diskusikan tentang masalah anggaran yang terbatas, termasuk pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial.
- 2) Kurangnya Kapasitas: Bahas mengenai tantangan dalam membangun kapasitas pegawai pemerintah desa dalam hal manajemen, keuangan, dan teknologi informasi.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Fokus pada masalah-masalah terkait dengan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.
- 4) Partisipasi Masyarakat: Diskusikan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program-program pemerintah desa.
- 5) Korupsi dan Etika: Bahas tantangan terkait dengan korupsi dan praktik-praktik yang tidak etis dalam tata kelola pemerintahan desa.
- 6) Pembangunan Berkelanjutan: Diskusikan tentang bagaimana desa bisa menghadapi tantangan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.

### **Strategi Mengatasi Tantangan**

Setelah mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut, diskusi kelompok difokuskan pada mencari strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut:

- 1) Penguatan Kapasitas: Usulkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah desa melalui pelatihan, pendampingan, atau pertukaran pengetahuan.
- 2) Peningkatan Transparansi: Diskusikan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti penerapan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi.
- 3) Mendorong Partisipasi Masyarakat: Ajukan ide untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui forum-forum partisipatif atau konsultasi publik yang lebih terstruktur.
- 4) Pengawasan dan Pengendalian: Diskusikan pentingnya memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan akuntabilitas yang lebih tinggi.
- 5) Kolaborasi antar Pihak: Usulkan strategi untuk membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada akhiri diskusi, pemateri dan peserta merangkum poin-poin utama yang telah dibahas dan dibuatkan kesimpulan tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Pada sesi ini pemateri mengajak peserta diskusi untuk berkomitmen dalam implementasi solusi-solusi yang telah disepakati.

### **Hari Kedua:**

1. Administrasi Pemerintahan Desa
2. Pengelolaan Keuangan Desa
3. Workshop tentang Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Keuangan

Pada hari kedua sesi pertama, pemateri menjelaskan pentingnya administrasi yang efektif dalam mengelola pemerintahan desa secara baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pada kesempatan ini pemateri menyampaikan materi secara singkat mengenai apa itu pemerintahan desa, peran dan tanggung jawabnya dalam konteks otonomi daerah. Selanjutnya secara berturut-turut menyampaikan topik materi dan diskusi sebagai berikut :

- a. Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa;
- b. Prinsip-prinsip Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Tantangan dalam Administrasi Pemerintahan Desa

Pada hari kedua sesi kedua kegiatan pengabdian pada masyarakat, pemateri dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram menjelaskan materi tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini adalah topik yang sangat relevan dan penting untuk dipahami oleh para peserta. Berikut adalah potensi struktur materi yang dapat dijelaskan dalam sesi tersebut:

- 1) Pengantar tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - a) Definisi dan pentingnya pengelolaan keuangan desa dalam konteks otonomi daerah.
  - b) Tujuan utama dari pengelolaan keuangan desa.
- 2) Perencanaan Anggaran : Proses perencanaan anggaran di tingkat desa untuk memastikan alokasi dana yang efektif dan efisien.
- 3) Pendapatan Des :
  - a) Sumber-sumber pendapatan desa seperti pajak, retribusi, dana alokasi umum, dan dana desa.
  - b) Strategi untuk meningkatkan pendapatan desa.
- 4) Pengeluaran Desa :
  - a) Prioritas pengeluaran dana desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial.
  - b) Prinsip pengeluaran yang transparan dan akuntabel.
- 5) Transparansi : Pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa untuk memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat.
- 6) Akuntabilitas : Tanggung jawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat.
- 7) Efisiensi : Mengutamakan penggunaan dana dengan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal bagi masyarakat desa.
- 8) Keterbatasan Sumber Daya : Tantangan dalam mengelola keuangan desa dengan sumber daya yang terbatas.
- 9) Kurangnya Kapasitas : Permasalahan terkait kurangnya pengetahuan dan keterampilan administratif dalam pengelolaan keuangan desa.
- 10) Pengawasan dan Pengendalian : Masalah-masalah yang mungkin timbul akibat kurangnya sistem pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan desa.
- 11) Penguatan Kapasitas : Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas pegawai desa dalam manajemen keuangan, termasuk pelatihan dan pendampingan.
- 12) Penerapan Teknologi : Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, seperti sistem informasi keuangan desa.
- 13) Partisipasi Masyarakat : Pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, misalnya melalui mekanisme audit sosial atau forum publik.

### **Hari Ketiga:**

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Pelayanan Publik yang Efektif
3. Studi Kasus dan Diskusi Kelompok
4. Evaluasi dan Pemberian Umpan Balik
5. Penutupan dan Pembagian Sertifikat

Pada hari ketiga sesi pertama, pemateri dari kegiatan pengabdian pada masyarakat program studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram menjelaskan materi tentang "Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembangunan Desa". Berikut adalah struktur materi tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat:

- 1) Pengantar tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa :
  - a) Definisi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
  - b) Pentingnya perencanaan yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Identifikasi Masalah dan Potensi Desa :
  - a. Proses mengidentifikasi masalah dan potensi desa sebagai dasar perencanaan pembangunan.
  - b. Pentingnya analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam mengevaluasi kondisi desa.
- 3) Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Desa : Bagaimana proses perumusan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat.
- 4) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes) : Proses penyusunan RPJMDes sebagai instrumen perencanaan jangka menengah untuk mencapai visi dan tujuan pembangunan desa.
- 5) Implementasi Program dan Kegiatan Pembangunan :
  - a) Bagaimana program dan kegiatan pembangunan desa dijalankan berdasarkan RPJMDes.
  - b) Koordinasi antara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program pembangunan.
- 6) Pengelolaan Sumber Daya dan Anggaran : Strategi untuk mengelola sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa.
- 7) Partisipasi Masyarakat : Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 8) Keterpaduan dan Sinergi Program : Bagaimana mengintegrasikan program pembangunan dari berbagai sektor untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
- 9) Pengawasan dan Evaluasi : Peran pengawasan dan evaluasi dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan desa berjalan sesuai rencana dan efektif.
- 10) Keterbatasan Sumber Daya : Tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan sumber daya yang terbatas.
- 11) Perubahan Iklim dan Kebencanaan : Bagaimana perubahan iklim dan bencana alam mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 12) Pengelolaan Konflik : Tantangan terkait dengan pengelolaan konflik dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- 13) Penguatan Kapasitas : Usulan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 14) Pemanfaatan Teknologi : Bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang lebih efektif.
- 15) Kemitraan dan Kolaborasi : Pentingnya membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan desa.

Pada hari ketiga sesi kedua, pemateri dari kegiatan pengabdian pada masyarakat program studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram menjelaskan materi tentang "Pelayanan Publik yang Efektif". Berikut adalah struktur materi tentang Pelayanan Publik yang Efektif dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan di Kantor Desa Bentek:

- 1) Pengantar tentang Pelayanan Publik :
  - a) Definisi pelayanan publik dan peran pentingnya dalam kehidupan masyarakat.
  - b) Tujuan dari pelayanan publik yang efektif.
- 2) Keterbukaan (Openness) : Pentingnya keterbukaan informasi dalam memberikan akses yang adil dan merata kepada masyarakat terhadap pelayanan publik.
- 3) Akuntabilitas : Tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa pelayanan publik diselenggarakan secara efisien dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4) Responsif : Kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara cepat dan efektif.

- 5) Keterlibatan Masyarakat (Citizen Engagement) : Pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan evaluasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat.
- 6) Desain Layanan (Service Design) : Proses merancang layanan publik yang mudah diakses, efisien, dan ramah pengguna.
- 7) Pengukuran Kinerja (Performance Measurement) : Pentingnya pengukuran kinerja dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang disediakan.
- 8) Penggunaan Teknologi (Technology Utilization) : Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik.
- 9) Keterbatasan Sumber Daya : Tantangan dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai dengan sumber daya yang terbatas.
- 10) Kualitas Layanan : Permasalahan terkait dengan kualitas pelayanan yang belum memenuhi harapan masyarakat.
- 11) Pengelolaan Pengaduan dan Keluhan : Tantangan dalam mengelola pengaduan dan keluhan masyarakat secara efektif.
- 12) Penguatan Kapasitas : Langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan responsif.
- 13) Peningkatan Transparansi : Pentingnya meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- 14) Inovasi dalam Pelayanan : Mendorong inovasi dalam merancang dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.
- 15) Contoh Pelayanan Publik yang Efektif : Menyajikan studi kasus atau contoh konkret dari daerah atau negara lain yang telah berhasil dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif.

Pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan transparan merupakan fondasi penting dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan. Di Desa Bentek, upaya untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa telah diwujudkan melalui kolaborasi antara Pemerintahan desa dan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram. Melalui inisiatif pengabdian pada masyarakat ini, sebuah program pelatihan bertajuk "Tata Kelola Pemerintahan Desa" telah dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek kunci dalam administrasi dan manajemen pemerintahan desa.

Pelatihan ini berfokus pada beberapa aspek krusial, termasuk pemahaman terhadap regulasi pemerintah, prosedur administrasi yang efektif, manajemen keuangan desa yang transparan, serta strategi untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lokal. Para peserta, yang terdiri dari perangkat desa dari berbagai bidang tugas, secara aktif terlibat dalam sesi-sesi diskusi, studi kasus, dan simulasi untuk memperdalam pemahaman mereka.

Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis perangkat desa, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya dan memastikan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, diharapkan bahwa implementasi praktik-praktik yang dipelajari dalam pelatihan ini akan menghasilkan perubahan positif yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa dan kualitas hidup masyarakat setempat. Kolaborasi antara Universitas 45 Mataram dan Pemerintah Desa Bentek merupakan contoh nyata dari upaya bersama dalam memajukan pemerintahan yang inklusif dan berdaya guna. Dengan terus memperkuat kemitraan semacam ini, diharapkan akan muncul lebih banyak inisiatif yang berdampak positif bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan bersama.

Artikel ini mencerminkan komitmen kami untuk memberdayakan masyarakat melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram dalam mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa di Desa Bentek dalam tata kelola pemerintahan. Peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyusun dan mengelola anggaran desa, melakukan perencanaan pembangunan, serta menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat

desa, peningkatan efektivitas program-program pembangunan desa, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.



**Gambar 1. Pelatihan Tata Kelola Pemdes (Sandi dkk, 2024)**



**Gambar 2. Pelatihan Tata Kelola Pemdes (Sandi dkk, 2024)**

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pelatihan tata kelola pemerintahan desa untuk perangkat desa di Desa Bentek merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang sangat relevan dan penting. Melalui pelatihan ini, perangkat desa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan lebih baik.

### **Saran**

Diharapkan, pelatihan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme perangkat desa dalam melayani masyarakat. Pelatihan ini merupakan salah satu langkah konkret dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Desa Bentek dan menjadi model bagi desa-desa lain dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.



## DAFTAR PUSTAKA

- A'an, S. M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), doi: 10.47753/pjap.v3i1.38, 1-6.
- Aan Anugrah, A. M. (2021). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN GOWA 2020. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, Volume 3 Nomor 1, <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5391>, 53-63.
- Angga Natalia, E. N. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, Vol.8, No. 1, DOI: 10.14710/jiip. v8i1.16513, 21 - 41.
- Citrano. (2022). IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DANA DESA. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 12 No. 1, 27 - 45.
- Djamin, I. S. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa. *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1), 25-36.
- Idah Rosidah, G. P. (2023). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENCEGAHAN FRAUD DIINSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS KANTOR KEC. CIWIDEY). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Volume 2, Number 1, 137 - 156.
- Laila Kholid Alfirdaus, T. Y. (2020). MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA, MENGEFEKTIFKAN DANA DESA. *JURNAL PENGABDIAN VOKASI*, Vol. 01, No. 04, 268 - 274.
- Neova Derenov, R. Y. (2023). ANALISIS KORUPSI DAN UPAYA MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* Vol. 15 No. 2, <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2>, 135-149.
- Refi Hasudungan Purba, S. W. (2022). Transparansi Dana Desa di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus di Desa Talang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), doi: 10.47753/pjap.v3i1.40, 18-29.
- Siregar, R. (2024). DINAMIKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA: TINJAUAN KASUS PROGRAM PARTISIPATIF. *Literacy Notes*, Vol 01, No. 02.
- Tati, F. F. (2024). Entrepreneurial Government Pada Pemerintahan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Spirit Publik* Volume 19, Nomor 1, <https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85782>, 112-125.
- Tryara Yulia Banobe, L. M. (2023). TATA KELOLA PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DESA KALIDAWIR KECAMATAN TANGGULANGIN. *INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN*, VOLUME 11 NO. 3, 323 - 338.
- Weny A. Dunga, A. H. (2017). PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO. *JURNAL ILMIAH HUKUM*, Volume 11 Nomor 1, 1-15.
- Widanarto, A. (2012). PENGAWASAN INTERNAL, PENGAWASAN EKSTERNAL DAN KINERJA PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 1, 1 - 73.